

Pengelolaan Konflik Horizontal di Kampung Harapan Jaya, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Berbasis Pendekatan Formal dan Informal

Annisa Kirana Andaneswari¹, Adrian¹, Melany Putri Bella Cristina¹

¹Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Kependidikan, Samarinda, Indonesia

¹Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Kependidikan, Samarinda, Indonesia

¹Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Kependidikan, Samarinda, Indonesia
Annisakirana@unukaltim.ac.id

ABSTRACT

This research uses a qualitative methodology by using inductive logic which tries to present new alternative thinking. This research explains conflict management in Kampung Harapan Jaya, Berau Regency, East Kalimantan. Through discourse analysis, the study seeks to analyze the management of conflicts formed through both formal and informal approaches. The purpose of this research is to contribute to the theoretical realm while making new findings that can be translated into an alternative policy for the government in the context of conflict management in plural areas. The main finding of this research shows that the conflict in Kampung Harapan Jaya is managed through three approaches, namely the figure approach, the region governance approach, and the socio-economic interaction approach among the local community. The region's governance approach leads to a negative peace situation. Meanwhile, the approach the informal interaction through socio-economic activities based on the local wisdom act has greater potential in creating positive peace situations. This research is important as a contribution to the issue of peace studies based on best practice research.

Keywords: Conflict Management, Kampung Harapan Jaya, Local Wisdom, Negative Peace, Pluralism, Positive Peace.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan logika berfikir induktif yang berusaha untuk menyajikan kerangka berfikir baru dalam menjelaskan pengelolaan konflik di Kampung Harapan Jaya, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Melalui analisa diskursus, penelitian ini berusaha untuk menganalisa pengelolaan konflik yang terbentuk baik melalui pendekatan formal maupun informal. Tujuan dari penelitian ini ialah berkontribusi di ranah teoritis sekaligus menghasikan temuan baru yang dapat ditranslasikan menjadi sebuah rujukan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan konflik di wilayah yang plural. Temuan dalam penelitian ini ialah konflik di Kampung Harapan Jaya dikelola melalui tiga pendekatan yakni pendekatan tokoh, pendekatan tata kelola wilayah dan pendekatan interaksi sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan tata kelola wilayah mampu menciptakan situasi *negative peace*. Sedangkan, pendekatan ketokohan dan interaksi informal melalui kegiatan sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal justru memiliki potensi lebih besar dalam menciptakan situasi *positive peace*. Penelitian ini menjadi amat penting dikaji sebagai kontribusi terhadap isu perdamaian berbasis *best practice research*.

Kata Kunci: Pengelolaan Konflik, Kampung Harapan Jaya, Kearifan Lokal, *Negative Peace*, Pluralisme, *Positive Peace*.

PENDAHULUAN

Kajian akan perdamaian dan konflik menjadi sangat penting bagi negara plural seperti Indonesia. Penelitian dalam isu perdamaian dan resolusi konflik yang berkembang cenderung di dominasi oleh kajian *penyelesaian konflik*. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kajian penyelesaian konflik horizontal di data base google scholars sebanyak 21.400 sedangkan pencegahan konflik horizontal hanya 6.450. Pada *database google scholars* banyak membahas upaya penyelesaian konflik yang sudah pecah misalnya antara suku Dayak dan Madura yang terjadi di Kota Sampit, Kalimantan Tengah (2001), konflik antara suku Bali dan suku Lampung yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan (2012), Konflik antar kelompok yang terjadi di Kota Ambon, Maluku (2001), konflik antar agama yang terjadi di Kaupaten Poso, Sulawesi Tengah (1998-2001) dan lain-lain. Sedangkan kajian berupa Pencegahan dan pengelolaan konflik tidak sebanyak kajian post conflict. Secara umum, pencegahan konflik mengacu pada strategi mengatasi konflik laten dengan harapan dapat mencegah meningkatkannya kekerasan. Sedangkan pengelolaan konflik mengacu pada upaya untuk menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi para pihak yang terlibat (Nurdin, 2015).

Maka, penelitian ini akan berkontribusi dalam mengisi celah penelitian sebelumnya dengan menggunakan *angle* yang berbeda yakni, pengelolaan konflik disituasi relatif damai. Pada penelitian ini, peneliti memisahkan pemahaman antara konflik dan kekerasan, sebab konflik merupakan dinamika sosial yang tidak dapat dihindari akibat interaksi manusia. Di sisi lain, Galtung memahami kekerasan sebagai bagian dari "*untransformed conflict*" atau konflik yang tidak ditransformasikan menjadi situasi damai melalui proses pengelolaan konflik yang benar. Dengan kata lain, konflik yang tidak berujung pada kekerasan utamanya kekerasan langsung (*direct violence*) dapat diartikan sebagai situasi yang damai namun masih berada pada level yang dipopulerkan oleh Galtung sebagai situasi *negative peace*. *Negative peace refers to an absence of aggression, violence and war* (Galtung, 1964). Sedangkan *positive peace* adalah situasi damai yang sifatnya lebih *sustain* dan harmonis. Penelitian ini berusaha untuk menganalisa bagaimana konflik atau gesekan yang timbul akibat perbedaan latar belakang etnis, budaya dan agama tidak lantas tereskalasi menjadi sebuah konflik komunal yang berujung kekerasan. Kampung Harapan Jaya menjadi lokasi studi yang mewakili wilayah dengan penduduk yang plural dan dapat dijadikan *best practice* dalam mentransformasikan konflik menjadi *negative peace* dan kemudian *positive peace*.

Kampung Harapan Jaya merupakan salah satu Kampung yang berada di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi salah satu lokasi tujuan transmigrasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Transmigrasi di Kampung Harapan Jaya pertama kali dilakukan pada tahun 1997, dimana penduduknya didatangkan dari berbagai tempat seperti Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Lokal (daerah yang berada satu Kecamatan/Kabupaten dengan Kampung Harapan Jaya). Hal ini menyebabkan Harapan Jaya menjadi Kampung yang majemuk dengan warga yang berasal dari berbagai latar belakang suku, budaya dan agama. Umumnya dinamika interaksi sosial pada masyarakat plural rentan dengan perselisihan antar suku, budaya dan agama seperti konflik yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit dan lain sebagainya.

Seringkali permasalahan personal memicu konflik komunal dan bertransformasi menjadi sentimen suku maupun agama layaknya yang terjadi di Poso, Ambon, Sampit, dan lainnya. Akar dari konflik bisa terjadi karena adanya kontradiksi, ketidakselarasan atau kelangkaan sebuah *goal*(Galtung, 2002). Kusuma Sp menjelaskan bahwa salah satu pemicu dari pecahnya konflik di Ambon adalah terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi antara penduduk asli dengan pendatang terutama dari Bugis, Buton, dan Makassar. Perasaan teralienasi dan segregasi sosial yang begitu nyata seringkali berkelindan dengan sentimen suku atau agama. Ketika kepentingan satu kelompok tidak diakomodir dengan baik, permasalahan individu pun bisa dengan mudah menjadi pemantik layaknya yang terjadi di Ambon, dimana perselisihan individu berbeda etnis kemudian meluas menjadi konflik religius antara Islam dan Kristen(Kusuma Sp., 2000).

Sebagaimana telah diuraikan, Kampung Harapan Jaya merupakan kampung tujuan transmigrasi yang menyebabkan struktur demografis menjadi begitu plural dan multikultural. Umumnya daerah dengan kondisi demikian sangat rentan dengan ketegangan dan perselisihan antar suku, budaya dan agama. Tak jarang pula gesekan kecil atau masalah personal tereskalasi menjadi sebuah konflik komunal yang berujung pada tindak kekerasan. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa dinamika konflik mampu dikelola dengan baik sehingga tidak berujung pada kekerasan layaknya yang terjadi di Sampit, Poso, Ambon dan lainnya. Di Kampung Harapan Jaya sendiri sempat beberapa kali muncul ketegangan lintas suku dan agama yang dilatar belakangi oleh permasalahan lahan, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Namun, ketegangan ini tidak teramplifikasi menjadi sebuah konflik yang masif melainkan dapat terselesaikan secara damai. Berangkat dari situasi dan kondisi demikian, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisa bagaimana konflik dikelola di Kampung Harapan Jaya.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkonfirmasi sebuah teori atau menguji sebuah teori yang sudah mapan, melainkan berusaha untuk menyajikan logika alternatif berfikir baru sesuai realitas yang terjadi dan berkontribusi bagi proses berfikir diranah konseptual dan teoritis. Konflik lintas agama dan budaya saling berkelindan satu sama lain dan seringkali menimbulkan konflik laten yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi sebuah kekerasan komunal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan konflik yang terjadi dalam rutinitas atau interaksi warga multietnis dan agama melalui analisa diskursus. Penelitian ini mengambil posisi pada pengelolaan konflik sebagai bagian dari *preventive action*. Tujuan akhir dari penelitian ini ialah pembaruan temuan yang dapat ditranslasikan dalam kerangka kebijakan pemerintah dalam pengelolaan konflik horizontal.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian *peace study* dikenal konsep *negative peace* dan *positive peace*, *negative peace* lebih menekankan perdamaian sebagai situasi dimana tidak ada perang atau konflik berbasis kekerasan langsung. Sebaliknya, *Positive Peace* melihat perdamaian lebih dari sekedar tidak adanya perang namun situasi damai hakiki yang ditandai dengan adanya struktur sosial yang mendukung hubungan kooperatif dan harmonis. Menurut studi yang dilakukan oleh Diehl, riset yang berkaitan dengan *positive peace* amatlah terbatas(Diehl, 2016). Secara tidak langsung, hal tersebut juga menunjukkan dominasi dari riset-riset yang berorientasi pada upaya-upaya *negative peace* seperti disarmament, repatriasi korban perang, negosiasi untuk penyelesaian

perang atau upaya limitasi konflik berbasis kekerasan yang sudah terjadi. Hal ini juga yang memperkuat klaim dari peneliti bahwa riset-riset yang membahas upaya *positive peace* masih dirasa kurang. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut melalui studi kasus di Kampung Harapan Jaya yang struktur sosialnya mencerminkan upaya-upaya *positive peace* melalui pendekatan formal misalnya, Kebijakan Tata Kelola Wilayah dan pendekatan informal seperti praktik-praktik kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini berusaha mengisi celah literatur melalui pendekatan akar rumput (*Bottom to Up*).

Lanskap literatur revidi akan dibagi menjadi dua, yakni kajian yang sifatnya teoritis dan kajian yang lebih menekankan pada temuan-temuan lapangan (empiris). Namun, jenis penelitian ini ialah *non-causal empirical theory* berbasis logika berpikir induktif yang tujuannya bukan untuk menguji sebuah teori yang sudah mapan. Oleh sebab itu, kajian-kajian Galtung dan Webber pada bagian literatur ini hanya sebagai referensi literatur bukan sebagai kerangka pikir utama yang perlu dibuktikan.

Menurut Galtung pada dasarnya konflik merupakan konsekuensi alami yang muncul karena perbedaan kepentingan antara masing-masing individu. Akar dari konflik bisa terjadi karena adanya kontradiksi, ketidakselarasan atau kelangkaan sebuah *goal*(Galtung, 2002). Contohnya, konflik yang disebabkan dari kontradiksi ialah A menginginkan X, B menginginkan Y. Namun konflik juga bisa terjadi ketika terdapat kelangkaan, misalnya A dan B menginginkan X dan keduanya tidak bisa mendapatkan X secara bersamaan(Galtung, 2002). Pada dasarnya konflik bukanlah hal yang buruk selama konflik tersebut tidak mengarah pada tindak kekerasan baik kekerasan langsung (*direct violence*) maupun kekerasan tidak langsung (*indirect violence*). Oleh sebab itu, konsep konflik dan kekerasan haruslah dibedakan meskipun konflik seringkali menjadi pintu masuk dari kekerasan(Galtung & Webel, 2005). Konflik dapat bertransformasi menjadi situasi damai melalui pendekatan *transcend* dimana penyelesaiannya melampaui *goal-goal* yang menjadi permintaan pihak bertikai.

Menurut Galtung, *goal* dari masing-masing pihak harus dikaji kembali dan dikonstruksikan ulang sebelum memasuki tahap negosiasi (Galtung & Webel, 2005) Resolusi Konflik menurut John Burton tidak sekedar metode "*dispute settlement*" melainkan menjadi sebuah metode yang berusaha menganalisa akar permasalahan dari konflik tersebut sehingga pendekatannya tidak sekedar menghentikan konflik sesegera mungkin namun juga mencegah konflik terjadi kembali dengan mencari akar permasalahan. Konflik menurut John Burton adalah sebuah pemecahan masalah berbasis analisa mendalam dengan studi-studi mengenai resolusi konflik dan perdamaian yang menekankan pentingnya memasukkan dimensi proses dalam setiap penyelesaian konflik(Burton, 1986).

Pada bagian literatur ini, peneliti juga berupaya untuk menghadirkan temuan dari studi-studi lapangan untuk menemukan *empirical gap*. *Empirical gap* yang ditekankan oleh peneliti ialah situasi pengelolaan konflik (*preventive*) bukan penyelesaian konflik yang sudah pecah atau tereskalasi menjadi peperangan. Oleh sebab itu, peneliti berusaha menghadirkan kajian-kajian terdahulu yang kebanyakan menekankan pada *post-conflict issue*. Penelitian disertasi dari Diah Kusumaningrum terkait proses rekonsiliasi pada konflik Ambon menemukan bahwa proses yang terjadi di Maluku adalah rekonsiliasi sehari-hari atau rekonsiliasi yang terjalin dalam rutinitas hidup tanpa perlu bantuan lembaga formal seperti Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi. Rekonsiliasi sehari-hari di Maluku terjadi di tiga ranah, yaitu: lingkungan sekitar, narasi, dan fungsional.

Argumentasi utama dari penelitian Diah Kusumaningrum ialah upaya resolusi konflik berbasis pendekatan legal dan formal seperti Komisi Kebenaran dan Restorasi *Justice* tidak selalu efektif dalam menyelesaikan pertikaian. Di sisi lain, interdependensi dari segi sosial dan ekonomi antar kedua belah pihak yang sebenarnya sudah terjalin cukup lama justru dapat menciptakan perdamaian setelah perang. Melalui konsep interdependensi Diah Kusumaningrum juga merujuk jalur-jalur rekonsiliasi yang diperkenalkan oleh John Paul Lederach (1977), Johan Galtung (2001), Antonia Chayes dan Martha Mnow (2003) untuk dapat merestorasi situasi damai yang berkelanjutan paska perang Ambon. Maka jelas sekali bahwa tulisan dari Diah Kusumaningrum berlatar belakang post-conflict dan upaya-upaya yang dilakukan untuk dapat menciptakan kondisi damai dan stabil setelah perang (Kusumaningrum, 2016).

Paul Collier dalam penelitiannya mencoba untuk menekankan pentingnya upaya resolusi konflik menggunakan pendekatan dari segi ekonomi karena paska konflik hampir seluruh struktur ekonomi rusak. Oleh sebab itu, dalam penelitiannya Collier menekankan resolusi konflik yang berbeda yakni dengan memotong anggaran belanja militer untuk dialihkan ke upaya penambahan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda sehingga potensi untuk perekrutan pemuda pada kelompok-kelompok bersenjata yang dapat menimbulkan perang saudara dapat diminimalisir (Collier & Hoeffler, 2006). Dalam tulisan Collier and Hoeffler (2006) yang lain juga menjelaskan temuan bahwa ketika pendekatan post-conflict bersifat koersif dalam hal ini meningkatkan *deterrence effect* melalui pengadaan aset-aset militer justru akan memicu munculnya konflik kembali. Contoh yang paling konkrit ialah perang saudara di Sierra Leone yang berusaha dihentikan oleh pemerintah melalui ancaman militeristik justru semakin memicu kelompok RUF kembali melakukan aksi pemberontakan dan menyerang desa Mende (Collier & Hoeffler, 2006). Fokus kajian dari Collier dapat dikatakan mengafirmasi teori kekerasan struktural oleh Johan Galtung yang berpotensi memicu peperangan sebab adanya kondisi *economic grievance*. Oleh sebab itu, Collier memusatkan kajian post-conflictnya melalui pendekatan ekonomi dengan upaya rekonstruksi tata kelola ekonomi sehingga akar masalah konflik yang berasal dari ketidakadilan distribusi ekonomi (kekerasan struktural) dapat diselesaikan. Berangkat dari kajian Collier, kami menemukan bahwasanya yang terjadi di Kampung Harapan Jaya, Kabupaten Berau ialah upaya-upaya preventif di level akar rumput untuk meminimalisir bentuk-bentuk kekerasan struktural yang dapat berkembang menjadi peperangan.

Penelitian selanjutnya yang bernuansa *post-conflict* atau *post-war* ialah penelitian dari (Wibowo, 2020) yang menganalisa pengembangan kurikulum edukasi perdamaian paska konflik Aceh. Hal ini bertujuan untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan paska konflik Aceh melalui tenaga pendidik profesional, institusi pendidikan dan lingkungan sekolah. Wibowo berpandangan bahwa upaya-upaya rekonsiliasi konflik seharusnya juga dilakukan melalui jalur pendidikan anak, hal ini secara tidak langsung juga menjadi investasi pembentukan karakter damai pada anak-anak sejak dini.

Peace building dan rekonsiliasi paska konflik menjadi hal yang signifikan untuk dilakukan. Burton dan John Lederach melihat bahwa selama proses rekonsiliasi diperlukan upaya-upaya untuk mentransformasi konflik. Dalam hal ini Lederach menekankan pada pentingnya identifikasi hubungan antara pihak-pihak berkonflik sehingga para *peace builder* dapat memahami penyebab dari *broken relationship* dan jalan penyelesaian yang dapat diambil (Lambourne, 2004)

Dalam tulisan Amelia Maika dengan judul "Pendekatan Kultural sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand" menyebutkan bahwa adanya segregasi kelas sosial telah menyebabkan setiap kelas memiliki kepentingan yang kontradiktif. Dengan demikian, konflik adalah salah satu akibat dari keragaman kepentingan dan posisi sosial. Konflik kepentingan terjadi ketika manusia mencoba memperoleh kepuasan diri dan berusaha menghindari adanya ketidakpuasan. Tulisan ini menyoroti tentang pendekatan kultural sebagai resolusi konflik yang terjadi di wilayah Khon Kaen Thailand. Dalam hal ini masyarakat Thailand menggunakan strategi menghindar sebagai salah satu cara mengelola konflik dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi. Terdapat dua nilai kultural yang menyebutkan strategi menghindar di dalamnya, yakni *bukhun* dan *kreencaj*. *Bukhun* adalah kewajiban moral untuk menjaga perilaku masyarakat yang harmoni. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga perilaku masyarakat dan menjaga kesopanan. Sedangkan *Kreencaj*, artinya berupaya memahami dan mengantisipasi perasaan orang lain sebelum bertindak. Pengertian ini kerap kali mendorong seseorang untuk tidak melakukan tindakan apapun, misal menghindari interaksi dengan orang lain dan cenderung menjaga jarak dengan siapapun. *Kreencaj* lebih terlihat dalam masyarakat yang tradisional atau konservatif (Maika, 2006).

Pengelolaan konflik berbasis tata kelola juga menjadi salah satu strategi yang jamak dilakukan oleh Pemerintah. Salah satu penelitian Riza Noer Arfani dengan judul "Governance Sebagai Pengelolaan Konflik" beranggapan bahwa sebuah tata kelola pemerintah berperan penting pada proses pengelolaan konflik. Salah satu konteks yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah kajian *Governance* dalam praktik-praktik lokal pengelolaan konflik. Dikatakan bahwa praktik-praktik lokal dapat menjadi basis bagi terselenggaranya praktik *Governance* yang khas dan bersumber dari kebijaksanaan atau kearifan lokal (*local wisdom*). Penggunaan kebiasaan lokal menjadi salah satu ciri yang menandai keberhasilan penerapan *Governance* untuk pengelolaan konflik. Yakni, dengan memberdayakan relasi-relasi sosial setempat yang telah ada atau berkembang sebelumnya menjadikan proses pemerintahan menjadi lebih mudah untuk diterapkan dibandingkan meniru secara kaku praktik-praktik sosial yang berasal di luar kebiasaan setempat. Semisal menggunakan pendekatan kebudayaan atau keagamaan yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menghasilkan *thick description* akan pengelolaan konflik. Proses penelitian dilakukan secara induktif dimana peneliti tidak berangkat pada sebuah teori atau generalisasi konsep, melainkan peneliti berangkat dari fakta empiris di lapangan. Dengan proses induktif, memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pengetahuan baru yang tidak selalu sama dengan pola-pola general yang sudah terpetakan sebelumnya (Bacon, 2012).

Penelitian ini bersandar pada diskursus analisis dengan menitik beratkan pada analisa pola-pola jawaban dari narasumber, metaphor dan pemilihan kata bahkan ekspresi yang digunakan oleh narasumber. diskursus analisis berpendapat bahwa semua tindakan dan pernyataan dari objek penelitian adalah penuh makna sehingga peneliti akan berusaha menginterpretasikan makna tersebut(Dawson, 2007). Untuk dapat memotret realitas dan mendapat narasi bermakna peneliti berusaha untuk menggabungkan beberapa metode yakni *in-depth interview* dan observasi lapangan. Peneliti melakukan interview terhadap beberapa tokoh masyarakat, pemuka agama dan masyarakat yang mewakili masing-masing golongan suku dan agama yang berbeda.

KERANGKA PEMIKIRAN

Bagian ini berusaha menunjukkan posisi teoritis pada penelitian ini. Penelitian ini didesain dengan proses atau logika berfikir induktif yang tidak berangkat pada sebuah teori mapan. Peneliti tidak berusaha menguji atau mengkonfirmasi sebuah teori pada penelitian ini, karena tujuan utamanya adalah menganalisa fenomena dari sebuah realitas yang terjadi di masyarakat. Temuan atau data yang didapatkan dari lapangan akan dianalisa menjadi sebuah pemahaman dan kemudian dikemas menjadi sebuah konstruksi baru atau logika berfikir baru yang benar-benar terjadi dalam realitas. Meski demikian, peneliti tetap menghadirkan konseptual sebagai bagian dari kerangka berfikir. Kajian konflik dan *peace studies* dipopulerkan oleh Johan Galtung dengan teori segitiga konfliknya yang membagi kekerasan menjadi 3 jenis, yaitu kekerasan langsung, kekerasan kultural dan kekerasan tidak langsung.

Kekerasan langsung dipahami sebagai bentuk dari kekerasan yang paling nyata dan terlihat sebagai contoh pemukulan yang dilakukan aparat polisi terhadap para demonstran, kekerasan komunal, genosida dan lain sebagainya. Kekerasan langsung berada pada posisi teratas yang menggambarkan situasi yang sedang tidak dalam keadaan damai. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Galtung bahwa perdamaian diartikan sebagai ketiadaan kekerasan(Galtung, 1996). Potensi kekerasan langsung akan semakin besar jika faktor eksklusi ini berpadu dengan "budaya kekerasan" (*cultural violence*) yaitu ketika masyarakat terbiasa memakai kekerasan sebagai solusi atas suatu permasalahan(Galtung, 1996). Di sisi lain, kekerasan struktural diartikan sebagai tindakan kekerasan yang tidak selalu nampak, namun benar-benar terjadi seperti kebijakan pemerintah yang menghasilkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Satu faktor dominan yang berperan besar dalam mendorong ketidakadilan menjadi kekerasan adalah faktor eksklusi dari struktur kekuasaan negara(Webel & Galtung, 2007).

Pada dasarnya konflik bukanlah hal yang buruk selama konflik tersebut tidak mengarah pada tindak kekerasan baik kekerasan langsung (*direct violence*) maupun kekerasan tidak langsung (*indirect violence*). Oleh sebab itu, konsep konflik dan kekerasan haruslah dibedakan meskipun konflik seringkali menjadi pintu masuk dari kekerasan(Galtung & Webel, 2005). Konflik dapat bertransformasi menjadi situasi damai melalui pendekatan *transcend* dimana penyelesaiannya melampaui goal-goal yang menjadi permintaan pihak bertikai.

Lebih lanjut dijelaskan, situasi damai merupakan kreativitas dalam mentransformasi sebuah konflik. Menurut Galtung, goal dari masing-masing pihak

harus dikaji kembali dan dikonstruksikan ulang sebelum memasuki tahap negosiasi (Galtung & Webel, 2005). Resolusi Konflik menurut John Burton tidak sekedar metode "*dispute settlement*" melainkan menjadi sebuah metode yang berusaha menganalisa akar permasalahan dari konflik tersebut sehingga pendekatannya tidak sekedar menghentikan konflik sesegera mungkin namun juga mencegah konflik terjadi kembali dengan mencari akar permasalahannya. Konflik menurut John Burton adalah sebuah pemecahan masalah berbasis analisa mendalam dengan studi-studi mengenai resolusi konflik dan perdamaian yang menekankan pentingnya memasukkan dimensi proses dalam setiap penyelesaian konflik (Burton, 1986).

Di sisi lain, Lederach tidak menggunakan istilah resolusi konflik dalam upaya penyelesaian konflik, melainkan menggunakan istilah transformasi konflik. Lederach menggunakan terminologi transformasi konflik pada tahun 1980-an, setelah mengalami pengalaman intensif selama berada di Amerika Tengah. Menurut Lederach, konsep resolusi konflik menjadi tidak relevan ketika diterapkan secara kaku dan formal. Lederach menganggap bahwa transformasi konflik menjadi relevan untuk upaya-upaya menciptakan situasi damai. Lebih lanjut dijelaskan oleh Lederach, transformasi konflik adalah suatu pemimpian (*envision*) dan merespon terhadap pasang surut gelombang dari konflik sosial sebagai kesempatan yang diberikan oleh kehidupan untuk menciptakan perubahan proses sosial yang konstruktif dimana dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan, dalam interaksi langsung dan struktur sosial, serta merespon masalah manusia dalam hubungan kemanusiaan.

Dalam pandangan transformasi konflik, konflik adalah sesuatu yang normal dan selalu ada dalam relasi sosial manusia. Dengan demikian, konflik akan memberikan dampak situasi dan kondisi serta dapat merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain dalam berbagai bentuk dan dalam cara yang berbeda. Seperti dikemukakan di atas, John Paul Lederach menawarkan untuk melihat dan menganalisa perubahan tersebut dalam 4 dimensi level yang berbeda. Empat dimensi perubahan tersebut yaitu perubahan ditingkat personal, relasional, struktural, dan kultural (budaya).

Dengan pendekatan yang berbeda, Ted Robert Gurr menjelaskan fenomena konflik dalam konsep *relative deprivation*. Secara sederhana, konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat menganggap diri mereka memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Di sisi lain, secara *de facto*, mereka tidak bisa memenuhi keseluruhan hak-hak tersebut karena dihalangi oleh struktur sosial yang ada dalam dirinya. Kesenjangan yang terjadi antara keduanya, atau ketika "harapan" tidak sesuai dengan "kenyataan," akan membuka kesempatan bagi munculnya ketidakpuasan serta protes (Gurr, 1971). Deprivasi merupakan perasaan yang timbul bila seseorang menyadari bahwa kondisi hidupnya mengalami kekurangan dalam beberapa hal, dan kekurangan tersebut mereka sadari ada pada diri orang lain dan ia merasa bahwa seharusnya hal-hal itu harus juga ia miliki. Deprivasi relatif adalah deprivasi yang dirasakan bila seseorang membandingkan dirinya dengan kelompok tertentu. Teori ini sering digunakan untuk menjelaskan konflik horizontal yang melibatkan warga mayoritas dan minoritas seperti yang terjadi di Sampit, Poso, Ambon dan Lampung Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

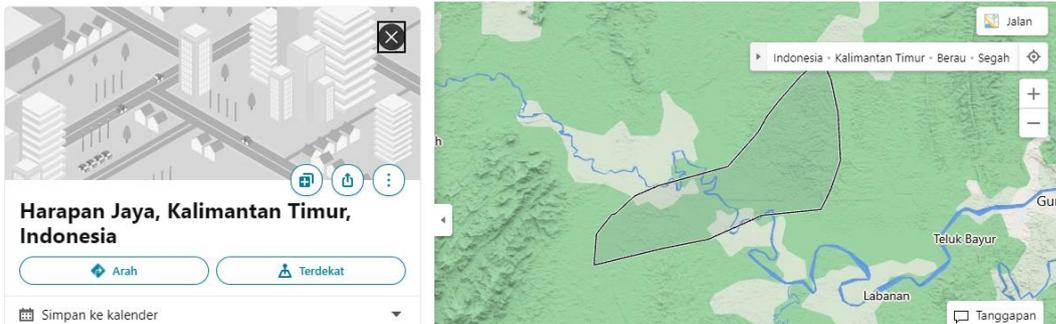
Dilihat dari konteks historis, Kampung Harapan Jaya merupakan salah satu Kampung yang dijadikan tujuan transmigrasi pada masa pemerintahan Orde Baru sekitar tahun 1997-an. Oleh sebab itu, kondisi demografis penduduknya sangat beragam dengan berbagai latar belakang suku, budaya dan agama. Umumnya kondisi masyarakat yang multikultural akan rentan terjadi gesekan yang menyebabkan konflik horizontal dan berujung kekerasan seperti halnya di Sampit, Poso, Ambon dan Lampung Selatan. Namun hal ini tidak terjadi di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah Kabupaten Berau Kalimantan Timur, setidaknya hingga penelitian ini dilakukan, tidak ada catatan konflik komunal yang terjadi. Penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah penelitian-penelitian sebelumnya yang bersifat *curing action*. Penelitian ini berupaya untuk menyajikan sebuah *lesson learned* atau pembelajaran dari upaya *preventive* melalui pendekatan-pendekatan informal dan formal yang ada pada Kampung Harapan Jaya, Kabupaten Berau.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan pada upaya atau pendekatan resolusi konflik paska terjadinya konflik, penelitian ini justru *menghighlight* situasi yang relatif kondusif dan damai pada Kampung Harapan Jaya yang sangat heterogen. Lederach melihat bahwa transformasi konflik adalah suatu upaya dalam merespon pasang surut gelombang dari konflik sosial sebagai kesempatan yang diberikan oleh kehidupan untuk menciptakan perubahan proses sosial yang konstruktif dimana dapat mengurangi kekerasan, meningkatkan keadilan dalam interaksi langsung dan struktur sosial. Ada beberapa hal dari teori Lederach yang menjadi cukup relevan dengan penelitian ini utamanya terkait upaya-upaya mengurangi kekerasan.

Merujuk pada teori segitiga kekerasan ala Galtung: kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kultural, maka tulisan ini juga berupaya untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang barangkali ada pada lokasi penelitian. Selain itu konsep-konsep penting seperti *positive peace* dan *negative peace* juga tetap menjadi landasan pemahaman pada tulisan ini. Meski demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi teori mapan, melainkan menyajikan kerangka berfikir baru berdasar temuan lapangan, sehingga dapat berkontribusi pada kajian-kajian peace studies yang sifatnya ialah *preventive action*.

PROFIL KAMPUNG HARAPAN JAYA

Kampung Harapan Jaya merupakan kampung yang terletak di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Berau tahun 2015, Kampung Harapan Jaya memiliki luas wilayah daratan seluas 6,46 Km² dan tidak memiliki wilayah perairan. Jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 2053 jiwa yang terdiri dari 649 Kepala Keluarga (KK) dan terdapat Rukun Tangga (RT) sebanyak 7 RT.



Sumber: (Google Map)



Sumber: (Dokumentasi Peneliti, 2021)

Adapun mata pencaharian penduduknya, yakni dalam sektor perkebunan dan pertanian. Di Kampung Harapan Jaya terdapat 4 agama yang dianut oleh masyarakat yakni Islam, Kristen, Katolik dan Hindu. Dan terdapat berbagai macam suku mulai dari suku Jawa, NTT, NTB, Sulawesi, dan lain-lain (Kantor Kepala Kampung Harapan Jaya). Di Kampung Harapan Jaya sendiri sempat beberapa kali muncul ketegangan lintas suku atau agama yang dilatar belakangi oleh permasalahan lahan dan kenakalan remaja, akan tetapi hal ini dapat diselesaikan secara damai oleh pemerintah daerah setempat.

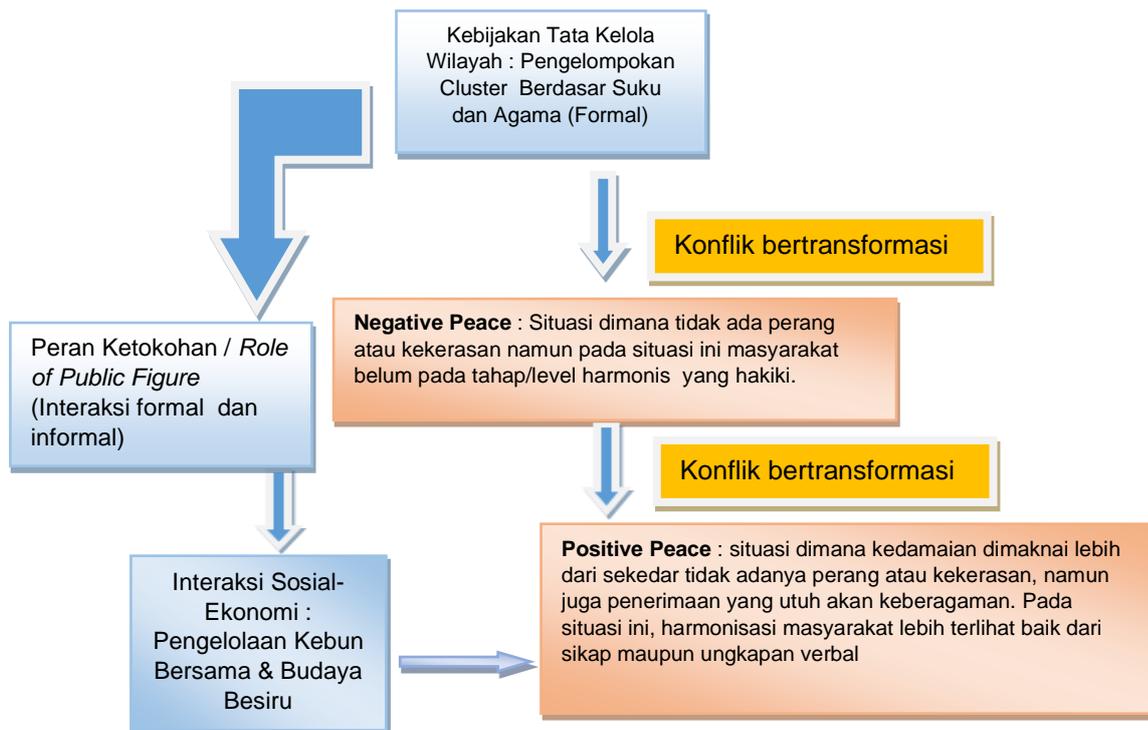
“Konflik antar suku atau agama di Kampung Harapan Jaya tidak pernah terjadi. Tapi permasalahan yang sempat terjadi berhubungan dengan permasalahan lahan antar individu. Namun hal ini dapat diselesaikan sehingga tidak berujung pada konflik kesukuan atau keagamaan. Permasalahan individu ini tentunya dapat membesar sehingga bisa saja melibatkan suku atau agama jika tidak ditangani dan diselesaikan dengan cepat. Penanganan dan penyelesaian dengan cepat inilah yang kita lakukan” (Ali Sasmirul, Kepala Kampung Harapan Jaya).

Kemudian pada permasalahan yang dipicu oleh kenakalan remaja terjadi pada tahun 2008. Dimana hal ini dilatar belakangi oleh aksi perkelaian anak muda dari Sulawesi dan suku Dayak. Anak muda tersebut berkelahi karena faktor memperebutkan seorang perempuan dan berada di bawah pengaruh minuman keras (mabuk).

“Sempat terjadi permasalahan pada tahun 2008, lokasinya di tempat hiburan. Karena disini (Kampung Harapan Jaya) terdapat tempat hiburan. Pada waktu itu, pemuda-pemuda yang terlibat berkelahian kita kembalikan kepada kepala suku masing-masing. Dan alhamdulillah bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga tidak berujung konflik antar suku. (Sukaji PJ Transmigrasi dan Pembentukan Kampung).

Muspika atau Musyawarah Pimpinan Kecamatan amat berperan dalam upaya-upaya untuk meminimalisir potensi konflik horizontal yang mungkin muncul. Tidak banyak cerita mengenai gesekan yang berpotensi tereskalasi menjadi konflik horizontal seperti kejadian konflik antar pemuda Sulawesi dan Dayak yang sempat terjadi di tahun 2018. Namun, kasus tersebut juga dapat menjadi lesson learned bahwa peran aktor masyarakat di level akar rumput cukup signifikan. Temuan utama dari tulisan ini ialah konflik dapat dikelola dan ditransformasikan menjadi situasi *negative peace* melalui pendekatan tata kelola wilayah. Namun, kondisi yang disebutkan sebagai *positive peace*, justru diciptakan oleh faktor interaksi sosial-ekonomi yang sifatnya informal seperti peran ketokohan dalam Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Gotong-royong, silaturahmi lintas suku dan agama, praktik pengolahan kebun bersama dan tolong menolong dalam menanam padi atau dikenal dengan istilah “Besiru”. Oleh sebab itu, pembahasan artikel ini akan dibagi menjadi dua bagian yakni, pengelolaan konflik yang berasal dari tata kelola wilayah dimana outputnya ialah *negative peace*, kemudian pengelolaan konflik yang mampu mentransformasikan *negative peace* menjadi *positive peace*.

Diagram 1. Pengelolaan Konflik di Kampung Harapan Jaya Kabupaten Berau



Sumber : Diolah oleh Penulis

PENGELOLAAN KONFLIK BERDASARKAN TATA KELOLA WILAYAH SEBAGAI PREVENTIVE ACTION

Tata kelola wilayah menjadi salah satu pendekatan formal yang didesain oleh pemerintah, baik pemerintah setempat maupun pemerintah pusat untuk meminimalisir terjadinya gesekan antar suku dan agama pada para transmigran (pendatang) dan masyarakat asli yang berbeda latar belakang. Perbedaan budaya, adat istiadat dan kepercayaan tentu berpotensi menimbulkan gesekan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, di Kampung Harapan Jaya terdapat pembagian lokasi/tempat dalam masyarakat menjadi 4 kluster yakni Trans Jawa, Trans Lombok, Trans Timur dan Trans Lokal. Pembagian tempat berdasarkan kesukuan ini ada sebelum Kampung Harapan Jaya terbentuk atau singkatnya telah ada sejak proses transmigrasi dan hingga kini masih ditemukan. Transmigrasi sebagai contoh yang “khas” dan strategi pengembangan wilayah yang “original” di Indonesia, sehingga pada hakikatnya transmigrasi tidak hanya berbicara pada konteks pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa namun juga manajemen konflik.

Penanggung Jawab Transmigrasi dan Pembentukan Kampung, Ahmad Sukaji, mengatakan, bahwa proses transmigrasi di Kampung Harapan Jaya dibagi menjadi 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada tahun 1997 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 100 KK yang berasal dari Pulau Jawa. Kemudian gelombang kedua pada tahun 1998 dengan jumlah 75 KK yang berasal dari Pulau Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya gelombang ketiga pada tahun 1999 dengan jumlah 75 KK yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Terakhir, gelombang keempat pada tahun 2000 dengan jumlah 25 KK yang berasal dari warga lokal (Dayak) dan pekerja eks PT Sumalindo yang telah dirumahkan. Seiring dengan berjalannya waktu syarat-syarat pembentukan suatu Kampung telah dapat terpenuhi, sehingga pada tanggal 1 April 2001 Kampung Harapan Jaya resmi terbentuk dengan jumlah 376 KK yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Jawa (A. Sukaji, wawancara, 2021).

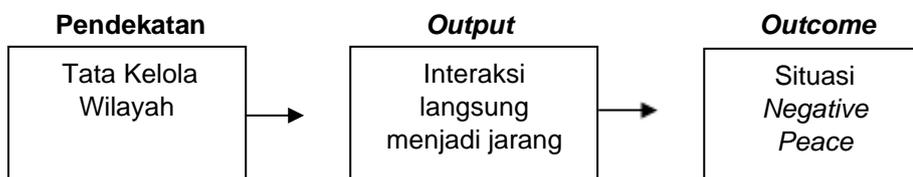
Kepala Kampung Harapan Jaya, Ali Sasmirul menjelaskan, bahwa adanya tempat-tempat yang disebut dengan Trans Jawa, Trans Lombok dan Trans Timur di Kampung Harapan Jaya disebabkan karena mayoritas penduduk dari setiap Trans berasal dari suku tersebut. Dimana pada masa transmigrasi pemerintah mendatangkan masyarakat dari berbagai Pulau seperti Pulau Jawa, Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kemudian ditempatkan terpisah sesuai dengan latar belakang suku dan agamanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan sebutan Trans Jawa, Trans Lombok dan Trans Timur (A. Sasmirul, wawancara, 2021).

Di sisi lain Ruslianto, Ketua RT 07 (Trans Lombok) sekaligus warga transmigran, mengatakan, terdapat hal menarik dari perbedaan penempatan masyarakat oleh pemerintah tersebut, dimana jika melihat masyarakat yang berasal dari Trans Jawa dan Trans Lombok yang warganya muslim ditempatkan pada bagian hulu Sungai Lawing (nama salah satu sungai yang ada di Kampung Harapan Jaya), sedangkan warga dari Trans Timur yang non-muslim berada di bagian hilir Sungai Lawing. Hal ini tidak lain ditujukan untuk mengantisipasi gesekan yang disebabkan karena masalah air yang terkontaminasi zat non-halal dari warga non-muslim. “*Trans Timur kemungkinan sengaja ditempatkan pada bagian bawah (hilir) sehingga mereka bebas melepas ternaknya disekitaran sungai tanpa was-was akan mengganggu warga muslim*” (Ruslianto, wawancara, 2020).

Sungai Lawing merupakan Sungai yang menjadi sumber air yang digunakan bersama untuk aktifitas mencuci, mandi, minum dan lainnya, sehingga penggunaan air secara bersama ini apabila tidak diatur dengan baik akan rentan memicu terjadinya konflik. Warga non-muslim bisa saja mencuci perkakas makan dan minum yang bisa jadi digunakan untuk wadah makanan atau minuman yang dianggap tidak halal bagi muslim. Selain itu, dikhawatirkan pula warga non-muslim mencuci atau membersihkan hewan-hewan yang tidak halal bagi muslim di Sungai. Jika warga non-muslim ditempatkan di atas, maka bisa jadi warga muslim akan menerima aliran air yang sudah terkena zat yang diharamkan dalam kepercayaan muslim dan hal ini dapat memicu konflik. Pengelompokan wilayah sesuai dengan suku dan agama juga ditujukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan budaya, adat istiadat dan cara pandang dalam melihat atau memahami suatu hal. *“Di wilayah Trans Timur kerap melakukan acara perayaan atau pesta yang barangkali akan mengganggu muslim, sebaliknya barangkali jika suara Adzan harus kami dengar saat subuh terus menerus juga akan mengganggu saudara non-muslim yang masih tidur sehingga perlu saling menjaga jarak”* (Ruslianto, wawancara, 2021).

Selain tata kelola wilayah, pemerintah setempat juga membentuk Polisi Masyarakat (Polmas) yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian pemerintah setempat juga merekrut pegawai pemerintahan dari perwakilan setiap suku/tempat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar suku dan agama yang dapat berujung pada terjadinya konflik. Narasi yang muncul dalam interview terkait tata kelola wilayah ialah menghindari konflik dan membatasi interaksi antar etnis dan agama agar tidak muncul gesekan dikemudian hari. Hal ini merupakan cerminan dari situasi *negative peace*. Warga tidak terlibat pada konflik komunal ataupun peperangan namun juga tidak berada pada tahap harmonis yang sesungguhnya. Pendekatan tata kelola wilayah merupakan strategi yang cepat dan mudah untuk menciptakan suatu kondisi yang relatif aman dan kondusif meski tidak selalu dapat dikatakan harmonis.

Diagram 2. Output dan Outcome dari Pendekatan Tata Kelola Wilayah



Sumber : Diolah oleh Penulis

PENGELOLAAN KONFLIK MELALUI KETOKOHAN DAN INTERAKSI SOSIAL-EKONOMI

Pada sisi ketokohan, baik tokoh agama maupun suku di Kampung Harapan Jaya memiliki peranan penting dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang keberagaman, dimana setiap suku memiliki tokoh/kepala suku yang diikuti dan didengarkan. Tokoh dan kepala suku inilah yang kemudian membawa sukunya dalam berinteraksi dan menjalin relasi harmonis dengan suku-suku lainnya. Tokoh

Masyarakat di Kampung Harapan Jaya memegang peranan penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai universal yang mampu menciptakan perdamaian. Pendekatan dialogis antar tokoh masyarakat dan keagamaan dilaksanakan melalui berbagai forum salah satunya Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Nilai-nilai keberagaman diinternalisasikan melalui berbagai saluran dakwah misalnya pengajian, majlis ilmu dan khotbah Jumat untuk umat muslim dan peribadatan mingguan dan lainnya untuk umat kristen (A. Samsirul, wawancara, 2021).

Muhammad Ridwan, Tokoh Agama Islam di Trans Lombok, mengatakan, bahwa terdapat suatu kesepakatan yang terbentuk di masyarakat, dimana apabila terjadi permasalahan atau konflik sesama suku atau berbeda suku, maka suku yang tidak terlibat dalam permasalahan atau konflik tidak boleh ikut campur dan penyelesaiannya diserahkan kepada tokoh dari suku yang bermasalah atau berkonflik. Dalam hal ini Muspika menjadi wadah untuk mengelola konflik berbasis pendekatan kekeluargaan dan ketokohan. Pimpinan keagamaan dan tokoh masyarakat amat dihormati dan dipercaya dalam memberikan solusi penyelesaian masalah lintas agama dan etnis di Kampung Harapan Jaya.

Muspika menjadi instrument penting dimana permasalahan-permasalahan lintas etnis dan agama dikelola sedemikian rupa agar dapat ditransformasikan menjadi situasi *positive peace*. Dalam dialog Muspika, tokoh masyarakat dan keagamaan senantiasa mencari *common denominator* yang dapat merekatkan hubungan antar etnis dan agama salah satunya dengan upaya membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang anggotanya berasal dari berbagai suku dan agama. Dengan demikian masyarakat bertani dan berkebun secara bersama-sama dalam satu lokasi pertanian dan perkebunan tanpa melihat perbedaan suku dan agama. Dalam hal ini ada kepentingan yang sama dalam Gapoktan yakni meningkatkan hasil pertanian dan melawan *rent-seeking* dalam rantai penjualan hasil bumi mereka.

“Melalui Muspika kita cukup sering mengadakan pertemuan dan diskusi dengan berbagai tokoh agama dan suku. Selain bertujuan untuk membahas situasi dan kondisi Kampung, juga bertujuan untuk mempererat jalinan silaturahmi antar suku dan agama disini, sekaligus menjadi sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan konflik lintas suku dan agama” (Ali Sasmirul, Kepala Kampung Harapan Jaya).

Yohanes Tuerah, Pendeta sekaligus pembina umat Kristen, menuturkan, bahwa di Kampung Harapan Jaya terdapat interaksi sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal yang secara tidak langsung mempererat hubungan lintas agama dan etnis yakni pengelolaan kebun secara komunal. Dimana ketika ada seseorang yang berniat menjual lahan atau kebunnya terlebih dahulu seseorang akan memberikan penawaran agar lahan atau kebun yang ingin dijual, dikelola secara bersama-sama dengan sistem yang saling menguntungkan. *“Jadi mau dia suku dan agama apapun, orang terlebih dahulu akan memberi penawaran agar kebun dikelola secara bersama. Sehingga ini mampu menyatukan masyarakat disini (Kampung Harapan Jaya)”* katanya.

Selain itu, dalam hal mengelola kebun secara bersama, masyarakat lintas suku dan agama memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan sehingga interaksi pun menjadi

lebih harmonis secara natural. Dalam proses pengelolaan kebun bersama, tentunya akan terjadi proses tawar-menawar terlebih dahulu, sehingga terbentuk suatu perjanjian yang disepakati bersama berdasarkan prinsip simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Tawar-menawar biasanya berkenaan dengan masalah pembiayaan, penggajian, dan keuntungan. Dalam hal ini si pemilik kebun mendapat keuntungan dengan dikelolanya kebun oleh pihak kedua yakni pekebun/pengelola, sedangkan pekebun/pengelola mendapat untung berupa gaji, tempat tinggal (pondok di perkebunan), makanan pokok dan lain sebagainya.

Terdapat dua model penggajian dalam proses pengelolaan kebun bersama yakni, dengan perhitungan harian atau borongan diberikan setelah pekerjaan yang dikerjakan selesai. Kedua, dengan sistem penggajian bulanan. Sistem penggajian ini tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal yang menarik ialah ditemukannya sikap-sikap *altruisme*, dimana sebagian pemilik kebun akan menghibahkan sebagian kecil kebunnya untuk si pekebun/pengelola jika dianggap berhasil mengelola kebun dengan baik dan dianggap telah mampu mendatangkan penghasilan kepada pemilik kebun. Sehingga si pengelola selain mengelola kebun si pemilik, juga dapat mengelola kebun pribadi yang telah diberikan (Y. Tuerah, wawancara, 2021).

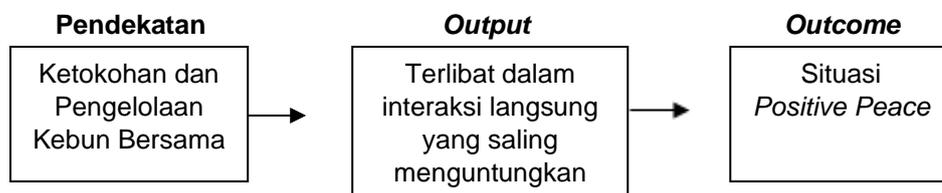
Selain pengelolaan kebun secara bersama, terdapat pula kearifan lokal lainnya yang secara tidak langsung mempererat hubungan lintas suku dan agama yakni, Kelompok Tani yang dibentuk oleh masyarakat. Di mana kelompok tani ini anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang suku dan agama. Para anggota kelompok tani ini mengelola lahan pertanian dan bertani secara bersama dalam satu lokasi pertanian, *“lahan pertanian disini dikenal dengan sebutan persawahan. Jadi dipersawahan itu kita bertani secara bersama-sama, ada dari suku Bugis, Jawa, Toraja, Lombok dan lain-lain”* tuturnya.

Ketika musim menanam padi tiba, para anggota Kelompok Tani akan saling tolong menolong dalam proses menanam padi. Misalnya ketika si A menanam padi maka si B akan membantunya. Dan ketika si B menanam padi maka si A berkewajiban pula untuk membantu. Disisi lain, terdapat pula cara lain yang digunakan ketika ada anggota kelompok tani yang tidak menanam padi, namun ikut membantu menanam padi di anggota kelompok tani yang sedang menanam padi, jika demikian, maka sistemnya tidak lagi seperti di atas, melainkan digaji sesuai jumlah hari ia membantu menanam padi (Y. Tuerah, wawancara, 2021).

Ketua RT 06 (Trans Timur), Beni Lukman, mengatakan, bahwa interaksi sosial masyarakat di Kampung Harapan Jaya terjalin dengan sangat baik. Dimana dalam masyarakat masih menjalankan kebiasaan silaturahmi. Silaturahmi ini tidak hanya berjalan dan diterapkan hanya dengan sesama suku atau seagama saja, melainkan juga berjalan dan diterapkan secara lintas suku dan agama. Tidak hanya itu, terjalinnya interaksi sosial lintas suku dan agama juga dapat dilihat pada saat kegiatan gotong royong, dimana masyarakat bekerja dan saling membantu secara bersama-sama dari berbagai suku dan agama. Interaksi sosial-ekonomi yang demikian menciptakan jalinan silaturahmi yang harmonis antar warga di Kampung Harapan Jaya. Keberagaman dimaknai sebagai sesuatu yang indah dan menguntungkan. *“Di kampung cukup sering diadakan gotong royong, mulai dari kegiatan membersihkan lingkungan, sampai gotong royong mempersiapkan kegiatan tertentu, semua*

masyarakat diundang dan hadir. Jadi di lokasi ketika gotong royong, selain kita bersih-bersih, kita juga saling ngobrol dan bercerita dengan masyarakat dari suku dan agama yang lain, hal ini secara tidak langsung juga mempererat hubungan antar sesama” (B. Lukman, wawancara, 2021).

Diagram 3. Output dan Outcome dari Pendekatan Ketokohan dan Interaksi Sosial-Ekonomi Berbasis Prinsip Besiru



Sumber : Diolah oleh Penulis

KESIMPULAN

Konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari sebagai akibat dari adanya interaksi antar manusia. Namun konflik dapat ditransformasikan menjadi dua jenis situasi damai yakni *positive peace* dan *negative peace*. Pada penelitian terdahulu, fokusnya ialah pada post-conflict sehingga muncul alternatif-alternatif pemikiran dalam resolusi konflik. Namun, temuan dari penelitian ini justru ada langkah preventive yang diambil sejak awal oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa untuk merespon kondisi demografi yang sangat multikultur akibat dari adanya kebijakan Transmigrasi. Pendekatan preventive dilakukan dengan memisahkan kluster hunian menjadi Trans Jawa, Trans Lombok dan Trans Timur yang pada pembahasan disebut sebagai pendekatan Tata Kelola Wilayah.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan konflik merupakan sebuah proses yang dinamis dan multiskalar. Dalam hal ini, Kampung Harapan Jaya Kabupaten Berau menjadi *best practice* untuk pengelolaan konflik melalui pendekatan formal yakni tata kelola wilayah dan juga pendekatan informal melalui ketokohan dan interaksi sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal. Pendekatan tata kelola wilayah bersifat *preventive action* dan outcomenya berupa situasi *negative peace*, sedangkan pendekatan ketokohan dengan memanfaatkan instrument Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan pengelolaan kebun bersama serta lainnya justru yang lebih berperan dalam mentransformasikan situasi *negative peace* menjadi *positive peace*. *Common denominator* atau kepentingan yang sama dapat mengabaikan perbedaan kebudayaan, agama dan etnis. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan untuk strategi kebijakan terkait resolusi konflik dan perdamaian.

REFERENCES

- Bacon, F. (2012). Competing Methodologies in Social and Political Research. In T. L. J. W. Moses (Ed.), *Francis Bacon and the Method of Induction*. Palgrave Macmillan.
- Burton, J. (1986). The Theory of Conflict Resolution. *Current Research on Peace and Violence*, 9(3), 125–130. <https://www.jstor.org/stable/40725036>

- Collier, P., & Hoeffler, A. (2006). Military Expenditure in Post-Conflict Societies. *Economics of Governance*, 7, 89–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10101-004-0091-9>
- Dawson, C. (2007). *Practical Guide to Research Method*. How to Books.
- Diehl, P. F. (2016). Exploring Peace: Looking Beyond War and Negative Peace. *International Studies Quarterly*, 60(1), 1–10. <https://doi.org/10.1093/isq/sqw005>
- Galtung, J. (1964). A Structural Theory of Aggression. *Journal of Peace Research*, 1(2), 95–119. <https://doi.org/10.1177/002234336400100203>
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Galtung, J. (2002). *Rethinking Conflict: The Cultural Approach*. Council of Europe.
- Galtung, J., & Webel, C. (2005). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Routledge.
- Gurr, T. R. (1971). *Why Men Rebel*. Princeton University Press.
- Kusuma Sp. (2000). Konflik di Ambon: Penafsiran Sosiologis Atas Pengamatan Konflik Januari-Mei 1999. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(3), 265–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.11131>
- Kusumaningrum, D. (2016). Interdependence versus Truth and Justice: Lessons from Reconciliation Processes in Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 20(1), 34–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.17998>
- Lambourne, W. (2004). Post Conflict: Peace Building: Meeting Human Needs for Justice and Reconciliation. *Peace Conflict Development*, 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7246/pcd.0404>
- Maika, A. (2006). Pendekatan Kultural Sebagai Strategi Resolusi Konflik: Kasus Khon Kaen Thailand. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 10(2), 181–199. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.11018>
- Nurdin, H. F. (2015). *Penanganan Konflik di Sambas Kalimantan*. 1–17. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/PENANGANAN-KONFLIK-DI-SAMBAS-KALIMANTAN-Conflict-Management-in-Sambas-Kalimantan.pdf>
- Webel, C., & Galtung, J. (Eds.). (2007). *Handbook of Peace and Conflict Studies*. Routledge.
- Wibowo, D. (2020). *The Role of School Culture in Teacher Professional Development for Peace Education: The Case of Three Schools in Post-Conflict Aceh Indonesia* [University of Otago]. <https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/10145>